

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Dukungan pada Tahapan Akses Indonesia ke OECD</i>					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD	Persentase	30%	10%	10%	100%
II	<i>Sasaran Program 2 Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi</i>					
2.1	Indikator 2.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20	Persentase	90%	30%	30%	100%
2.2	Indikator 2.2 Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)	Persentase	90%	40%	40%	100%
III	<i>Sasaran Program 3 Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral</i>					
3.1	Indikator 3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD dalam rangka akses Indonesia ke OECD	Persentase	90%	30%	30%	100%

3.2	Indikator 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional	Persentase	90%	45%	45%	100%
3.3	Indikator 3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)	Persentase	90%	50%	50%	100%
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Indeks	3 dari 4	3	3,56	118%
IV	Sasaran Program 5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Profesional					
5.1	Indikator 5.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Persentase	92%	45%	45%	100%

Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Dukungan pada Tahapan Akses Indonesia ke OECD

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Dukungan pada Tahapan Akses Indonesia ke OECD, ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD
Pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri dan penyampaian dokumen tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan Indonesia dalam proses akses dan menunjukkan keseriusan serta kesiapan teknis dalam menjawab ekspektasi Komite OECD dalam tahap evaluasi teknis berikutnya.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase

Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses review dari Komite OECD

Latar Belakang

Persentase Dokumen Initial Memorandum yang Selesai Proses Review dari Komite OECD merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan koordinasi dan pengawalan proses akses Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), khususnya pada tahapan evaluasi substansi oleh Komite OECD. Indikator ini menilai sejauh mana dokumen Initial Memorandum (IM) yang telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia berhasil melalui proses review teknis dan substantif oleh Komite OECD sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku dalam proses akses.

Dalam kerangka akses OECD, Initial Memorandum merupakan dokumen penilaian mandiri awal yang disusun oleh Pemerintah Indonesia untuk menilai tingkat keselarasan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik nasional dengan instrumen hukum OECD yang relevan. Dokumen ini menjadi dasar bagi Komite OECD untuk melakukan review awal, mengidentifikasi area keselarasan maupun kesenjangan kebijakan, serta merumuskan pertanyaan klarifikasi, catatan, dan rekomendasi awal kepada negara aksionis.

Proses review oleh Komite OECD mencakup pembahasan mendalam atas substansi Initial Memorandum melalui kajian dokumen, pertukaran pertanyaan dan jawaban (question and answer process), serta diskusi teknis antara Komite OECD dan Pemerintah Indonesia. Dalam tahapan ini, Pemerintah Indonesia, melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga yang difasilitasi oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretariat Tim Nasional OECD, bertanggung jawab untuk menyiapkan klarifikasi, penjelasan tambahan, dan penajaman posisi kebijakan guna mendukung kelancaran proses review.

Pelaksanaan indikator ini berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD yang menetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Pelaksana, serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024 tentang struktur pelaksana Tim Nasional OECD dan pembagian bidang kerja sesuai Peta Jalan Akses Indonesia. Dalam struktur tersebut, Sekretariat Tim Nasional OECD berperan mengoordinasikan respons pemerintah terhadap proses review Komite OECD, memastikan konsistensi narasi kebijakan, serta memantau progres penyelesaian review pada masing-masing bidang Tim Nasional OECD.

Persentase capaian indikator ini dihitung berdasarkan tingkat progres penyelesaian substansi dokumen Initial Memorandum dalam proses review oleh Komite OECD dibandingkan dengan total target penyelesaian dokumen pada periode pengukuran. Indikator ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas kementerian/lembaga, kesiapan substansi kebijakan nasional, serta kemampuan Pemerintah Indonesia dalam merespons standar dan ekspektasi OECD sebagai bagian dari tahapan kunci menuju keanggotaan OECD.

Formula perhitungan kinerja dari Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Progres Penyelesaian Reviu Initial Memorandum}}{\text{Total Keseluruhan Proses Reviu Initial Memorandum}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 30%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun target untuk Triwulan II sebesar 10% ditentukan berdasarkan tingkat penyelesaian proses reviu dokumen Initial Memorandum oleh Komite OECD sebagai bagian penting dari tahapan awal akses Indonesia ke keanggotaan OECD. Indikator ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam menyiapkan dan menyampaikan klarifikasi, penjelasan tambahan, serta respons kebijakan atas catatan dan pertanyaan Komite OECD terhadap Initial Memorandum yang telah disampaikan. Pencapaian indikator ini menunjukkan kesiapan substansi kebijakan dan regulasi nasional serta konsistensi posisi Pemerintah Indonesia dalam memenuhi standar dan mekanisme evaluasi OECD sesuai dengan Peta Jalan Akses Indonesia.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD yang mencapai target yang telah mencapai 10% dari target Tahun 2026 sebesar 30% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD	Persen	10%	10%	100 % (Memuaskan)

Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD merupakan *direct cascading* dari indikator Persentase Penyelesaian Tahapan Akses OECD. IKU ini ditargetkan sebesar 30% dan sampai dengan laporan ini disusun, persentase penampaian Dokumen IM kepada Sekretariat OECD telah mencapai 10%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi yang telah tercapai per Triwulan II adalah sebagai berikut:

1.1 Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD Tahun 2026	Terlaksana	- Delegasi Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian, Wakil Menteri Keuangan, dan Dubes RI Paris serta turut dihadiri Sekretariat Tim Nasional OECD - PTM OECD 2026 mengangkat tema “Getting Industrial Policies Right for Open Markets, Growth and Prosperity”. Pertemuan dipimpin Finlandia selaku Chair MCM OECD 2026 serta Korea Selatan dan Selandia Baru selaku Vice-Chairs. - Pemri (Menko Perekonomian dan Wamenkeu) menyampaikan intervensi pada sesi yang terbuka secara umum, dengan fokus pada kebijakan perindustrian, mendorong kompetisi yang sehat, pasar yang terbuka dan adil, dan investasi untuk pembangunan. - Delri juga melakukan beberapa pertemuan bilateral (Finlandia, Jepang, AS, Inggris, Australia, Swiss, BIAC, Sekjen OECD) dan diskusi dengan Diaspora Indonesia di OECD. - Hal-hal yang mengemuka dalam PTM OECD 2026 → Tekanan global meningkat karena konflik, inflasi, kerawanan pangan dan disrupsi rantai pasok. → Tantangan struktural berupa penurunan produktifitas, inequalitas,

			aturan perdagangan global yang terbelah, populasi banyak negara maju yang menua, serta transisi digital dan hijau. → Kebijakan industri kembali menjadi opsi yang dipertimbangkan negara-negara OECD, namun tingkat keberhasilannya bergantung pada desain kebijakannya. → Produktivitas menjadi fondasi perekonomian, untuk itu diperlukan investasi pada skills, riset, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, serta transisi digital dan energi
2.	Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan Fact-Finding Mission, dan/atau Penyusunan National Action Plan Bidang Persaingan Usaha	Terlaksana	- Sekretariat OECD telah menyampaikan kuisisioner bidang persaingan usaha pada tanggal 21 Januari 2026. Kuisisioner dimaksud bertujuan untuk mengumpulkan informasi guna melakukan penilaian secara komprehensif terhadap hukum dan kebijakan persaingan usaha di Indonesia. - Kementerian Perdagangan selaku penanggung jawab bidang telah menyampaikan kuisisioner beserta follow-up kuisisioner pada tanggal 22 Mei 2026 kepada OECD.
3.	Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan Fact-Finding Mission, dan/atau Penyusunan National Action Plan Bidang Statistika	Terlaksana	- Kuisisioner Statistical Policy telah disampaikan kepada OECD pada tanggal 7 Juni 2026 yang berfokus pada (i) Recommendation on Good Statistical Practice, (ii) Sound Statistical and Data Infrastructure, (iii) Fulfill Obligation in Article 3 of the OECD convention, dan (iv) Integration into the OECD's reporting and information system yang terbagi pada

			beberapa kuisisioner, yaitu Legal Framework, Statistical and data infrastructure, serta Data and Metadata dalam berbagai bidang.
4.	Koordinasi Penyiapan Kuesisioner, Pelaksanaan Fact-Finding Mission, dan/atau Penyusunan National Action Plan Bidang Finansial dan Tata Kelola Perusahaan	Terlaksana	- Kuisisioner telah <i>fully submitted</i> pada tanggal 8 Juni 2026 yang didasarkan pada 3 (tiga) instrumen hukum OECD, (i) Recommendation of the Council on Principles of Corporate Governance (OECD/LEGAL/0413), (ii) Recommendation of the Council on Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises (OECD/LEGAL/0414), dan (c) Recommendation of the Council on Guidelines on Anti-Corruption and Integrity in State-Owned Enterprises (OECD/LEGAL/0451).
5.	Koordinasi Penyiapan Kuesisioner, Pelaksanaan Fact-Finding Mission, dan/atau Penyusunan National Action Plan Bidang Asuransi dan Dana Pensiun	Terlaksana	- OJK selaku koordinator bersama K/L anggota bidang dan Sekreteriat Tim Nasional OECD telah merumuskan dan menyusun jawaban kuisisioner terkait kebijakan perasuransian di Indonesia dalam rangka pelaksanaan tahapan technical review, yang mencakup aspek perlindungan konsumen, pengaturan prudensial, kelembagaan, serta kinerja sektor. - Kuisisioner telah seluruhnya disampaikan kepada Sekretariat OECD pada tanggal 30 April 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pada 15-17 April 2026 diselenggarakan OECD Senior-Level Meeting untuk Environment Policy Committee. Pada 17 April 2026 dilaksanakan pertemuan

untuk review akses Indonesia bersama Environment Policy Committee. Kementerian Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab dan koordinator bidang lingkungan hidup diwakili oleh Staf Ahli Menteri LH Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan. Turut hadir Dubes RI Paris dalam pertemuan dimaksud. KLH mempresentasikan Rencana Aksi Nasional bidang lingkungan hidup sehubungan proses akses Indonesia. Terdapat masukan dari Komite OECD bagi Indonesia terkait area: transboundary pollution – prosedur analisis dampak lingkungan hidup terhadap bahaya polusi lintas batas, environmental information – pentingnya mengatasi kesenjangan data dalam informasi lingkungan, dan energy dan climate change mitigation memperjelas kerangka waktu rencana aksi, utamanya terkait penghentian penggunaan batu bara dan insentif energi terbarukan.

2. Pada 24 April 2026 dilakukan debrief session antara Kementerian Perdagangan dan Sekretariat OECD untuk menyampaikan hasil dari pertemuan OECD Trade Committee. Sekretariat OECD memetakan 3 (tiga) klusterisasi isu, yaitu,
 - Isu-isu yang paling intensif dibahas oleh negara anggota dan memerlukan tindak lanjut, mencakup: i) perizinan impor, ii) ketentuan sertifikasi yang dinilai kurang transparan pada Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan Technical Barriers to Trade (TBT), iii) persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan iv) larangan ekspor, termasuk pada sektor mineral kritis.
 - Isu-isu yang disampaikan oleh setidaknya satu anggota dan berpotensi memerlukan tindak lanjut
 - Isu-isu berdasarkan identifikasi Sekretariat OECD, mencakup: i) notifikasi Indonesia berdasarkan Perjanjian World Trade Organization on Subsidies and Countervailing Measures (WTO SCM), ii) pembatasan pembayaran elektronik, iii) hambatan terhadap perdagangan elektronik, dan iv) preferensi terhadap produk farmasi produksi dalam negeri.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan pertemuan secara virtual menggunakan zoom meeting dengan Sekretariat OECD serta melakukan pertemuan-pertemuan lainnya menggunakan fasilitas ruang rapat kantor sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp27.850.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan pertemuan yang akan dilakukan pada TW III-IV.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi,

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20
2. Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20

Latar Belakang

IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi multilateral yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, menyinkronisasikan, mengendalikan kebijakan, serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi multilateral dalam forum Sherpa G20 yang menghasilkan komitmen untuk diadopsi oleh negara anggota G20, serta mendorong pencapaian kepentingan strategis Indonesia di tingkat global. Dalam hal salah satu komitmen tidak dapat dicapai karena alasan di luar kendali, maka capaian dapat digantikan oleh komitmen lain yang relevan dan sepadan dalam kerangka kerja yang sama.

Komponen ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati pada Leaders' Declaration dan/atau forum-forum yang berada di bawah Sherpa Track G20, yang mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi multilateral yang mendukung program prioritas nasional. Cakupan kesepakatan tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, komitmen di bidang perdagangan internasional, fasilitasi investasi lintas negara, dukungan pembiayaan inklusif, ketahanan rantai pasok global, transformasi digital yang adil dan merata, pengembangan infrastruktur berkelanjutan, serta inisiatif transisi energi yang berlandaskan prinsip keadilan iklim.

Komitmen yang dimaksud dapat mencakup Leaders' Declaration, Communiqué, Chair's Summary, Joint Declaration, Deliverables konkret lintas sektor, inisiatif kerja sama tematik, atau program lanjutan yang diperoleh melalui rangkaian pertemuan pada Sherpa Track G20 baik dalam bentuk Pertemuan Tingkat Menteri (PTM), Working Groups, Engagement Groups, maupun pertemuan antar pejabat tinggi dan kementerian/lembaga terkait. Kesepakatan ini difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan K/L teknis dan perwakilan Indonesia di forum internasional, dengan tujuan akhir mendukung kepentingan pembangunan nasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi global.

Komponen ini dibobotkan sebesar 100% karena pelaksanaan proses kerja sama ekonomi multilateral dalam forum Sherpa G20 merupakan tugas dan fungsi pokok dari Asdep KSE Multilateral.

Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Multilateral dalam Forum Sherpa G20 Tahun 2026 sebesar 5 Komitmen, yang merupakan komitmen, diantaranya namun tidak terbatas pada:

1. Leaders' Declaration
2. Energy Abundance Working Group's Outcomes
3. Innovation Working Group's Outcomes
4. Trade Working Group's Outcomes, dan

5. Business 20 Communique

Formula perhitungan kinerja dari Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Jumlah\ Komitmen}{Target\ Komitmen\ (5)} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 90%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Multilateral pada Forum Sherpa G20 telah mencapai target yang ditetapkan pada Triwulan II, yaitu sebesar 30%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20	Persentase	30%	30%	100% (Memuaskan)

Sampai dengan laporan ini disusun, Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20 sudah tercapai sesuai target IKU yang ditetapkan pada Triwulan II, yaitu 30%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pertemuan Sherpa Ke-2 G20 Presidensi Amerika Serikat	Terlaksana	- Pertemuan Sherpa G20 ke-2 dilaksanakan di Washinton DC pada tanggal 29-30 Juni 2026. Pertemuan membahas usulan deliverables untuk 4 (emoat) working groups menuju KTT G20 2026.

			- Mayoritas negara mendukung arah kebijakan Amerika Serikat namun menyoroti isu sensitif seperti forced labor, reformasi MFN, energy transition, serta kebijakan AI terkait data dan lisensi. Indonesia mendukung sebagian besar usulan dengan beberapa catatan penting, termasuk menjaga prinsip WTO, fleksibilitas kebijakan nasional, hilirisasi, dan penguatan kapasitas negara berkembang. - Pada Pertemuan Kelompok Emerging Market Economies (EMEs) anggota G20 pada tanggal 28 Juni 2026, negara-negara menyoroti tidak diundangnya Afrika Selatan oleh AS serta proses negosiasi yang dinilai tidak transparan. Di sela pertemuan Sherpa, Indonesia juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral untuk menyamakan pandangan, membahas peluang kerja sama ekonomi, dan saling berbagi pandangan mengenai agenda G20. Koordinasi MIKTA juga dilakukan untuk memperkuat posisi bersama di G20.
2.	Rangkaian Perundingan Posisi Energy Abundance Working Group, Innovation Working Group, dan Trade Working Group	Terlaksana	- Rangkaian Pertemuan G20 Energy Abundance Working Group dilaksanakan tanggal 21 April 2026 dan 20 Mei 2026. - Innovation Track Working Group Meeting melaksanakan pertemuan kedua pada tanggal 16 April 2026 dan dilanjutkan pertemuan ketiga pada tanggal 19 Mei 2026 - G20 Trade Working Group Meeting dilaksanakan pada 28 April 2026 dan dilanjutkan pada tanggal 19-20 Mei 2026. - Hasil dari rangkaian pertemuan tersebut menjadi dasar penyusunan dan konsolidasi posisi nasional Indonesia pada Pertemuan ke-2 Sherpa G20 Presidensi Amerika Serikat yang

			disusun oleh Kemenko Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri selaku Sekretariat Sherpa G20.
--	--	--	---

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya Menghadiri Pertemuan Working Group secara virtual, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp47.500.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk menghadiri Pertemuan Sherpa G20 ke-3, ke-4 dan KTT Pada Triwulan III s.d. Triwulan IV.

2.2 Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)

Latar Belakang

IKU ini mengukur tingkat efektivitas komitmen terkait implementasi proyek kerja sama ekonomi multilateral yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan yang mencerminkan upaya untuk mewujudkan kebijakan kerja sama ekonomi multilateral yang efektif, melalui penerjemahan kesepakatan internasional ke dalam bentuk proyek konkret yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi hijau, serta percepatan transisi energi bersih di Indonesia.

Fokus utama dari pengukuran ini adalah pada dua inisiatif strategis, yaitu Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC), yang menjadi bagian dari penguatan posisi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral di bidang lingkungan dan energi. Kedua skema ini diharapkan menghasilkan komitmen proyek yang terkoordinasi dengan baik, sejalan dengan agenda pembangunan nasional, dan memiliki kontribusi terhadap target pembangunan rendah karbon.

Target Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) adalah berupa 5 komitmen, 5 komitmen resmi, yang berasal dari implementasi JCM dan AZEC, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Hasil Pertemuan Expert Group (EG) dari Asia Zero Emission Community (AZEC);
2. Keputusan Komite Bersama/Joint Committee Joint Crediting Mechanism (JCM) perihal registrasi, metodologi, dan issuance proyek; Komitmen bersama yang dihasilkan dalam AZEC Ministerial Meeting;
3. Joint Declaration Asia Zero Emission Community (AZEC) Leaders' Meeting;
4. Chairs' Statement dari AZEC Plus Summit on Energy Resilience.

Formula perhitungan kinerja dari Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Implementasi Proyek JCM dan AZEC}}{\text{Total Implementasi Proyek JCM dan AZEC}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 90%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Multilateral pada Forum Sherpa G20 telah mencapai target yang ditetapkan pada Triwulan II, yaitu sebesar 40%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)	Persentase	40%	40%	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)				
No	Rencana Aksi TW II		Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	AZEC Summit	Plus on	Terlaksana	- Pemerintah Indonesia bersama Jepang dan negara-negara mitra Asia Zero Emission Community (AZEC) mengambil langkah proaktif dengan

			menggelar AZEC Plus Online Summit Meeting pada 15 April 2026. Pertemuan daring dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Jepang, Takaichi Sanae. - Sebagai respons konkret atas krisis energi yang tengah berlangsung, pertemuan ini meluncurkan “<i>assistance package plan</i>”. Inisiatif ini dirancang untuk menyepakati langkah-langkah strategis di berbagai aspek, mulai dari mitigasi darurat jangka pendek guna mengamankan pasokan minyak mentah dan produk energi, hingga penguatan struktur ketahanan energi kawasan dalam jangka menengah dan panjang melalui transformasi AZEC menjadi AZEC 2.0 serta peluncuran paket pembiayaan sebesar 1,5 triliun yen. - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Jepang dalam menyelenggarakan pertemuan ini di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan energi global. Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa kerja sama dalam AZEC harus terus berlandaskan prinsip “<i>One Goal, Various Pathways</i>” guna menangkap keunggulan ekonomi unik di setiap negara. Menko Airlangga juga menyampaikan langkah nyata Indonesia dalam memitigasi situasi di Teluk Persia, khususnya Selat Hormuz, yakni rencana implementasi program biodiesel B50 pada pertengahan 2026 dan penyelesaian roadmap PLTS Atap 100GW tahun ini sebagai pilar utama
--	--	--	---

			peningkatan ketahanan energi nasional.
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Proposal untuk agenda AZEC-EGM ke-10: Floating Solar PV Initiative in Batam
2. Menghadiri Rapat Persiapan Pertemuan Special AZEC Senior Official Meeting tanggal 13 April 2026.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penyelenggaraan Rapat yang dilakukan melalui zoom dan pemanfaatan ruang rapat di kantor sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp20.800.000.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses revidi dari Komite OECD dalam rangka akses Indonesia ke OECD
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional
3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)

3.1 Persentase

Efektivitas

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses revidi dari Komite OECD dalam rangka akses Indonesia ke OECD

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program,

rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Efektivitas tersebut diukur berdasarkan capaian terhadap beberapa sub-komponen utama yang menjadi lingkup Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait kerja sama ekonomi multilateral, termasuk namun tidak terbatas pada, antara lain:

1. Perencanaan Kebijakan;
2. Implementasi Kebijakan;
3. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan;
4. Transparansi dan Partisipasi Publik.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 90%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

Sampai dengan laporan ini disusun, Tingkat Efektivitas Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum dalam Rangka Akses Indonesia ke OECD telah memenuhi target TW 1 sebesar 30% atau 33% jika dibandingkan dengan Target tahunan sebesar 90%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD dalam rangka akses Indonesia ke OECD	Persentase	30%	30%	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Dokumen Initial Memorandum yang direviu dari komite OECD

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Rangkaian Persiapan Pertemuan Tingkat Menteri OECD	Terlaksana	Dalam rangka persiapan kehadiran Pemerintah Indonesia dalam OECD Ministerial Council Meeting pada tanggal 3-4 Juni 2026, Sekretariat Tim Nasional OECD menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada tanggal 12 Mei 2026. Dalam rapat tersebut Settimnas membahas, (i) progres Technical Review pada masing-masing bidang akses, (ii) Identifikasi kebutuhan dukungan K/L dalam pelaksanaan Technical Review, dan (iii) Finalisasi perubahan Kepmenko Perekonomian Nomor 232 tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional OECD
2.	Rapat koordinasi teknis pemenuhan elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan bidang bidang Persaingan Usaha	Terlaksana	- Rapat Koordinasi pembahasan pengisian kuisisioner bidang persaingan usaha telah dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan tahap technical review dalam proses akses Indonesia pada OECD dan menindaklanjuti permohonan tanggapan terhadap pertanyaan lanjutan kuisisioner OECD yang disampaikan oleh Tim Sekretariat OECD melalui surat elektronik pada tanggal 7 April 2026. - Pada tanggal 18 Mei 2026, Rapat Koordinasi diselenggarakan untuk monitoring perkembangan proses pengisian tanggapan pada pertanyaan lanjutan kuisisioner OECD di bidang

			persaingan usaha dan Identifikasi kebutuhan bantuan teknis (<i>technical assistance</i>) dalam proses aksesasi OECD di bidang persaingan usaha.
3	Rapat koordinasi teknis pemenuhan elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan bidang statistik	Terlaksana	- Settimnas OECD telah mengadakan Kick-off Meeting Persiapan Technical Review yang dihadiri oleh Deputy Director OECD Statistic and Data, Head of Unit Global Relations Statistician Analyst/Accession Coordinator Bidang Statistik OECD, dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BPS. - Rapat Koordinasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2026. Pada rapat tersebut dilakukan proses konsolidasi internal dan lintas K/L untuk proses pengisian kuisisioner dan usulan submisi seluruh kuisisioner yang berjumlah 30.
4	Rapat koordinasi teknis pemenuhan elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan bidang Tata Kelola Perusahaan	Terlaksana	- Sekretariat Tim Nasional OECD telah melaksanakan Kick-off Meeting Pelaksanaan Technical Review pada tanggal 3 Mei April 2026. - BP BUMN selaku koordinator bidang telah melaksanakan beberapa rapat koordinasi pengisian kuisisioner persiapan dan pelaksanaan fact-finding mission pada tanggal 22 April, 7 Mei, dan 15 Juni. Settimnas turut hadir dan sampaikan beberapa masukan. - Seiring deegan bergulirnya proses aksesasi, lingkup penilaian OECD pada bidang tata kelola perusahaan secara luas, tidak terbatas pada perusahaan milik negara, sehingga Settimnas OECD telah berkoordinasi dengan BP BUMN, OJK, dan KPK pada tanggal 26 Mei 2026 terkait

			penyesuaian koordinator bidang tata kelola perusahaan yang akan berkoordinasi dengan Working Parties on State Ownership and Privatisation Practices.
5.	Rapat koordinasi teknis pemenuhan elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan bidang Asuransi dan dana pensiun		- Rapat Koordinasi telah dilaksanakan pada tanggal 14-17 April 2026 sehubungan dengan penyampaian catatan diskusi mengenai self-evaluation Indonesia atas tingkat keselarasan kebijakan Indonesia dengan Rekomendasi OECD terkait Pensiun Berbasis Aset, serta kuesioner untuk bidang asuransi, yang akan digunakan sebagai acuan fact-finding mission mendatang. - Sehubungan dengan Pelaksanaan Fact-finding mission oleh Tim OECD yang membidangi sektor asuransi dan dana pensiun di Jakarta pada tanggal 5–11 Juni 2026 sebagai tahapan lanjutan dalam proses akses, rapat koordinasi telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2026 secara daring.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Tim Nasional OECD juga telah melakukan engagement berkelanjutan dengan pemangku kepentingan akses OECD unsur non-pemerintah seperti parlemen, CSO, dunia usaha, hingga serikat buruh.
 - Kunjungan kepada Pimpinan BALEG dan BKSAP DPR RI pada 2 April 2026 bersama Koordinator Akses OECD untuk menginformasikan perkembangan akses. Hal ini ditindaklanjuti Pimpinan BALEG dan KSAP DPR RI dengan menyampaikan update lebih lanjut kepada Pimpinan DPR RI.
 - Pelaksanaan kolaborasi dengan KADIN untuk diseminasi proses dan manfaat akses OECD kepada dunia usaha pada 14 dan 21 April 2026. Program ini turut didukung oleh Pemerintah Inggris dengan menghasilkan Panduan Akses OECD untuk Dunia Usaha.
 - Pertemuan dengan serikat buruh yang diinisiasi oleh Trade Union Advisory Committee (TUAC OECD) dan KSBSI pada 22 April 2026.

Pertemuan ini dihadiri oleh General Secretary TUAC dengan fokus untuk mengundang kontribusi aktif serikat pekerja pada proses akses.

2. Telah dihadiri kegiatan Jaring Masukan “Pemetaan Kerja Sama Technical Assistance and Capacity Building (TACB) dalam rangka Mendukung Proses Technical Review Akses Indonesia ke OECD” pada 24–26 Mei 2026 di Universitas Padjadjaran, Bandung yang diselenggarakan oleh Pusat Strategi Kebijakan Multilateral (PSKM) Kementerian Luar Negeri. Kegiatan ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi dukungan TACB untuk memperkuat posisi Indonesia dalam proses technical review akses OECD. Kegiatan melibatkan kementerian/lembaga anggota Tim Nasional Akses Indonesia ke OECD, akademisi, pelaku usaha, serta Prospera.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penyelenggaraan Rapat yang dilakukan melalui zoom, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp15.800.000.

3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Efektivitas tersebut diukur berdasarkan capaian terhadap beberapa sub-komponen utama yang menjadi lingkup Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait kerja sama ekonomi multilateral, antara lain, namun tidak terbatas pada:

1. Outcomes dari Rangkaian Pertemuan Sherpa G20 Amerika Serikat;
2. Outcomes dari Rangkaian Intersesi Sherpa G20 Amerika Serikat berupa Draft G20 Leaders' Declaration atau Dokumen Tingkat Pemimpin serupa yang dihasilkan oleh Presidensi G20 Amerika Serikat.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat)

tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebijakan;
2. Implementasi Kebijakan;
3. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan;
4. Transparansi dan Partisipasi Publik.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 90%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

Sampai dengan laporan ini disusun, Tingkat Efektivitas Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum dalam Rangka Akses Indonesia ke OECD telah memenuhi target TW 1 sebesar 45% atau 50% jika dibandingkan dengan Target tahunan sebesar 90%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional	Persentase	45%	45%	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Rapat Persiapan Pertemuan Sherpa ke-2 G20 Presidensi Amerika Serikat	Terlaksana	Sehubungan dengan Pertemuan Sherpa ke-2 Presidensi G20 Amerika Serikat pada tanggal 29-30 Juni 2026, telah dilaksanakan rapat Koordinasi untuk menjaring masukan dan membahas perkembangan substansi pada masing-masing working group pada tanggal 18 Juni 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Menghadiri Pertemuan “Sherpa 1.5” pada tanggal 2 Juni 2026 secara virtual. Pertemuan difokuskan pada pembahasan perkembangan pilar prioritas dari 3 (tiga) working group, bottleneck pembahasan, serta menyamakan pandangan negara anggota G20 terhadap proses negosiasi untuk menghasilkan outcomes dan deliverables menjelang Pertemuan Sherpa ke-2 yang akan dilaksanakan di Washington D.C. pada 29-30 Juni 2026.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penyelenggaraan Rapat yang dilakukan melalui zoom, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp14.750.000.

3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint

Latar Belakang

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan berupa Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada JCM dan AZEC dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait, kalangan akademisi dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

**Crediting
Mechanism (JCM)
dan Asia Zero
Emission
Community (AZEC)**

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada JCM dan AZEC diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses, yaitu:

1. Perencanaan Kebijakan;
2. Implementasi Kebijakan;
3. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan;
4. Transparansi dan Partisipasi Publik.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 85%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

Sampai dengan laporan ini disusun, Tingkat Efektivitas Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) telah memenuhi target TW 1 sebesar 50 atau 55,5% jika dibandingkan dengan Target tahunan sebesar 90%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)	Persentase	50%	50%	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penguatan efektivitas koordinasi dan akselerasi tindak lanjut implementasi proyek dengan stakeholders AZEC	Terlaksana	- Dilaksanakan pembahasan mengenai perkembangan Proyek Legok Nangka dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 19 Mei 2026, termasuk skema transaksi blended finance dan perkembangan hibah dari Invest International (Belanda) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertemuan juga membahas aspek kelembagaan dan regulasi penerimaan hibah, mencakup peninjauan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dasar hukum yang sesuai, pihak yang berwenang menandatangani Grant Agreement, serta dokumen yang diperlukan dalam proses tersebut. Selain itu, didiskusikan alternatif skema penandatanganan apabila Kemendagri tidak dapat bertindak sebagai grantee, antara lain melalui skema back-to-back agreement dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau penandatanganan langsung oleh Badan Usaha Pengelola dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Competent Authority, disertai dukungan atau konfirmasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar hibah dapat diimplementasikan sesuai ketentuan yang berlaku. - Pembahasan penyesuaian tarif kepada PLN terkait Pembaruan

			Proposal Penyesuaian Tarif untuk Proyek IPP Panas Bumi Sarulla sebagai upaya mendukung kontribusi energi terbarukan.
2.	Diskusi atas Progres Proyek JCM	Terlaksana	- Sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi strategi penyesuaian implementasi Joint Crediting Mechanism (JCM) dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, pada tanggal 20 April 2026 telah diselenggarakan rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut membahas: (i) kebijakan sektor energi dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025; (ii) tahapan otorisasi proyek JCM pada sektor energi; dan (iii) kebijakan alokasi kredit karbon dari proyek JCM sektor energi. - Pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Joint Crediting Mechanism Implementation Agency (JCMA), Mr. Yuji Mizuno, pada 13 Mei 2026 membahas percepatan implementasi Joint Crediting Mechanism (JCM), termasuk peluang penerbitan <i>Internationally Transferred Mitigation Outcomes</i> (ITMOs) pada tahun 2026. Saat ini terdapat 62 proyek JCM di Indonesia yang didominasi teknologi efisiensi energi dan energi baru terbarukan, serta memiliki potensi pengembangan <i>Carbon Capture and Storage</i> (CCS) dan <i>Carbon Capture, Utilization, and Storage</i> (CCUS). Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, Kemenko Perekonomian bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah menyepakati percepatan implementasi JCM melalui pembahasan lanjutan dengan Kementerian ESDM dan kementerian/lembaga terkait. Permohonan JCMA dipandang positif sebagai upaya menyelaraskan implementasi

			JCM di Indonesia dengan ketentuan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 beserta peraturan pelaksanaannya pada sektor energi.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan JCM Consultation Meeting dengan Calon partisipan Proyek.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penyelenggaraan Rapat yang dilakukan melalui zoom dan menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp23.500.000.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Capaian Indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Latar Belakang

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing – masing item survey}}{\text{Jumlah item survey}}$$

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:
A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4

- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
 C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
 D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4 (Baik) atas indeks. Hingga Triwulan II Tahun 2026, Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang mencapai target yang telah terealisasi melebihi target Tahun 2026 sebesar Indeks 3 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Indeks	3 dari 4	3,56	118%

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral pada tahun 2026 ditargetkan sebesar indeks 3 dari 4. Sampai dengan laporan ini disusun, realisasi dan capaian kinerja TW 1 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil tersebut, IKU Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral diproyeksikan akan berjalan dengan baik dan target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Hal ini didukung oleh pelaksanaan sejumlah koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui rapat koordinasi. Rapat-rapat tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program, menyelesaikan hambatan teknis, serta menyepakati langkah tindak lanjut bersama.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan

			(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyelenggaraan Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Triwulan II sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan kualitas layanan serta ketepatan waktu pelaksanaan	Terlaksana	Dalam rangka memperoleh penilaian atas pelaksanaan koordinasi pada TW II, telah dilakukan penyusunan kuesioner survei serta penyebaran tautan survei kepada para counterpart K/L dan stakeholders terkait lainnya.

5

Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Profesional

Pencapaian Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Profesional

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Capaian Indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja 2026, Rencana Aksi dan Manual IKU;
2. Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja;
3. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan;
4. Penyusunan Renja 2026;
5. Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026;
6. Penyusunan Matriks Manajemen Risiko;
7. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi; dan
8. Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral

$$\% \text{ Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92% atas Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun target triwulan sebesar 25% dipilih mengacu kepada tren progress atas cascading dari Program Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2026.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 45% atau mencapai 48% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Persentase	45%	45%	100% (Memuaskan)

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan laporan ini disusun, realisasi dan capaian kinerja TW II telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, maka diprediksi realisasi dan capaian kinerja pada tahun

2026 khususnya pada IKU Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral diproyeksikan akan berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang berjalan sesuai rencana, didukung dengan koordinasi internal yang efektif, pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta komitmen seluruh unit kerja dalam memenuhi target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada triwulan berikutnya diharapkan tetap berjalan sesuai target.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Presentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Asisten Kerja Sama Ekonomi Multilateral			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pembentukan Tim Kerja dalam rangka memenuhi target kinerja	Terlaksana	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral telah melakukan penyusunan Surat Keputusan Tim Kerja tahun 2026 dalam rangka memenuhi target kinerja
2.	Penyusunan Laporan Kinerja TW II	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II 2026 dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan kinerja.
3.	Inisiasi optimalisasi implementasi Srikandi	Terlaksana	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi untuk pemrosesan surat dan disposisi telah

			dilaksanakan selama Triwulan II
--	--	--	---------------------------------

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri rapat penyusunan penetapan perjanjian kinerja, rencana aksi, dan manual IKU baik secara internal di lingkungan Kedeputian maupun pembahasan secara langsung dengan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
2. Menyusun Monitoring dan Evaluasi untuk Capaian Kegiatan dan Anggaran melalui E-Monev Bappenas setiap bulannya.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya perjalanan dinas yang dibayarkan at cost, rapat dilaksanakan secara daring melalui media zoom meeting, menfurangi penggunaan kertas dalam penyusunan naskah dinas yang telah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan SRIKANDI.

Jakarta, 10 Juli 2026

Plt. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral



Cahyadi Yudodahono